



Bupati Janji Tata Asset

SANGGAU, TRIBUN - Bupati Sanggau, Poulus Hadi, mengakui persoalan inventarisasi asset-asset daerah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) baginya. Untuk itu, ia berjanji akan terus melakukan penataan dalam upaya mewujudkan satu di antara program unggulannya dalam *Seven Brand Images*, Sanggau Tertib.

"Saya sudah mendiskusikan itu dengan asisten supaya membuat pertemuan khusus untuk semua SKPD. Asset kita sebenarnya sudah mulai ditata. Tapi pendapat dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga supaya ini harus lebih diperbaiki, terutama asset tak bergerak, seperti tanah. Ini merupakan PR yang menjadi bagian dari Sanggau Tertib," katanya, Kamis (23/7).

Bupati mengakui tidak adanya kekuatan hukum tetap terhadap asset-asset yang bersumber dari hibah masyarakat menjadi kendala dalam menginventarisir aset yang ada. "Makanya saya meminta kepada mereka (SKPD) asset ini masalahnya *clear* atau tidak. Kalau bermasalah, masalahnya apa? Itu yang harus kita catat. Memang harus ada tahapan dari tahun ke tahun, itu harus ada

yang diselesaikan," katanya.

Dalam penertiban aset tersebut, Bupati meminta dimulai dari wilayah Kota Sanggau. Ia mengakui, beberapa asset di kota masih ada yang belum terinventarisir dengan baik. "Saya mau dimulai dari kota dulu. Jangan sampai yang di depan mata kita malah bermasalah. Ternyata di kota masih ada juga yang mengklaim, keluarganya, ahli warisnya," ungkapnya.

Kejelasan secara hukum asset Pemda dinilai, sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Bupati mengaku tak akan membangun apapun di tanah yang belum jelas kepemilikannya.

"Kalau tidak jelas, saya tak akan mau. Misalnya, kita mau membangun A, tapi assetnya bukan Pemda, ya janganlah. Tanah itu dikatakan *clear* kalau sudah bersertifikat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sanggau, Hadi Sudiby mengaku saat ini tengah gencar-gencarnya menginventarisir aset-aset daerah berupa bangunan dan rumah, terutama di wilayah-wilayah kecamatan.

Persoalan yang saat ini dihadapi pemerintah adalah

sulitnya mencari bukti-bukti yang membuktikan asset tersebut, seperti surat-menyurat. Pasalnya, tak sedikit asset Pemda berupa tanah merupakan hasil hibah masyarakat setempat. Karena itu, Hadi bertekad agar semua aset Pemda bisa dapat berkekuatan hukum. "Makanya, semua SKPD sangat berperan. Karena data-data asset ini harus terkini," pungkasnya.

Ketua LSM Citra Hanura Sanggau, Zaenuri mengapresiasi langkah Bupati yang akan mengumpulkan seluruh SKPD untuk menata asset yang ada. "Saya setuju sekali, karena asset daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah," jelasnya. **(hen)**